

Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005

Jonatan Lassa

1. Pendahuluan: Paradoks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan (*food security*) adalah paradoks dan lebih merupakan penemuan dunia modern. Secara prosentase, lebih banyak produsen pangan di masa lalu ketimbang masa kini; tetapi dunia hari ini lebih aman pangan ketimbang masa lalu. Paradoks ini bisa terlihat jelas di banyak Negara maju, salah satunya adalah Inggris Raya; Prosentase populasi pertanian di UK tahun 1950 adalah 6 % dan terus menurun secara drastis hingga 2 % di tahun 2000, dan berdasarkan prediksi FAO (*Food and Agriculture Organisation*), jumlah populasi pertanian di Inggris akan terus turun menjadi 1% di tahun 2010. Sederhananya, sekitar 896,000 petani akan memberi makan sedikitnya 60 juta penduduk.

Indonesia saat ini memiliki 90 juta petani (seratus kali dari Inggris) atau sekitar 45% penduduk “memberi makan” seluruh penduduk (sekitar 230 juta orang). Tetapi fakta-fakta dari Nusa Tenggara Barat (yang kerap dikenal sebagai daerah lumbung padi) serta daerah semi arid seperti Nusa Tenggara Timur di semester pertama tahun 2005, justru menghadapi ketahanan pangan yang rapuh, terbukti dengan tingginya tingkat kekurangan pangan dan gizi buruk.

2. Definisi Ketahanan Pangan Dari Waktu Ke Waktu

Pendefinisian ketahanan pangan (*food security*) berbeda dalam tiap konteks, waktu dan tempat. Sedikitnya ada 200 definisi ketahanan pangan (Lihat: FAO 2003 dan Maxwell 1996) dan sedikitnya ada 450 indikator ketahanan pangan (Hoddinott 1999).

Istilah ketahanan pangan (*food security*) sebagai sebuah konsep kebijakan baru pertama kali muncul pada tahun 1974, yakni ketika dilaksanakannya konferensi pangan dunia (Sage 2002). Maxwell (1996) mencoba menelusuri perubahan-perubahan definisi tentang ketahanan pangan sejak konferensi pangan dunia 1974 hingga pertengahan decade 90an; perubahan terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga dan individu; dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) hingga pada perspektif penghidupan (*livelihood perspective*) dan dari indikator-indikator objektif ke persepsi yang subjektif. (Lihat: *Maxwell & Frankenberger 1992*).

Maxwell and Slater (2003) juga turut mengevaluasi definisi ketahanan pangan sepanjang waktu dan menemukan bahwa wacana (*diskursus*) mengenai ketahanan pangan berubah sedemikian cepatnya dari fokus pada ketersediaan-penyediaan (*supply & availability*) ke perspektif hak dan akses (*entitlements*). Sejak tahun 1980an awal, diskursus global ketahanan pangan didominasi oleh hak atas pangan (*food entitlements*), resiko dan kerentanan (*vulnerability*). Buku *The Poverty & Famines*-nya Amartya Sen (1981) dianggap sebagai salah satu pelopor utama perubahan perspektif ketahanan pangan (Maxwell & Slater, 2003; Boudreau & Dilley, 2001).

Diakui bahwa Amartya Sen berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum Maltusian yang kerap berargumentasi bahwa ketidak-ketahanan pangan dan kelaparan (*famine*) adalah soal produksi dan ketersediaan semata. Sedangkan dengan mengangkat berbagai kasus di India dan Afrika, Sen mampu menunjukkan bahwa ketidak-tahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan (*entitlements failures*) bahkan ketika produksi pangan berlimpah, ibarat “tikus mati di lumbung padi”. Kasus busung lapar di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu bukti.

Sedikitnya ada empat element ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*) di level keluarga yang diusulkan oleh Maxwell (1996), yakni: pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberian (*transfer*). Ketiga ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko dan jaminan pengaman sosial. Keempat: fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi dan/atau siklus. Pendefinisian formal dalam Box 1 memberikan pengertian yang saling melengkapi.

Box: 1 Definisi Formal Ketahanan Pangan

1st World Food Conference 1974, UN 1975: ketahanan pangan adalah "ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan ... dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga."

FAO 1992: Ketahanan Pangan adalah "situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman (safe) dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.

World Bank 1996: Ketahanan pangan adalah: "akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

Oxfam 2001: Ketahanan pangan adalah kondisi ketika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan control atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang katif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim).

FIVIMS 2005: Ketahanan Pangan adalah: kondisi ketika “semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.”¹

Indonesia – UU No.7/1996: Ketahanan Pangan adalah :”Kondisi di mana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (safety), distribusi yang merata dan kemampuan membeli.

3. Keutamaan Beras Sebagai Konstruksi Sosial

Penyamaan swasembada beras dengan ketahanan pangan sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Ini semacam mitos yang terus direproduksi ulang dari masa ke masa. Ketersediaan beras di gudang Bulog kerap di jadikan basis ketahanan pangan di level propinsi maupun kabupaten. Hal ini mengidiskasikan pengutamakan beras sebagai indikator ekonomi nasional.

Dominasi beras atas sumber daya pangan lainnya di Indonesia dapat ditemukan dalam istilah-istilah lokal seperti “palawija” (Sansekerta, phaladwija) yang harfiahnya berarti sesuatu yang bukan beras (sekunder) atau pangan kelas dua, sesuatu yang terkonstruksikan secara budaya (*culturally constructed*).

Beras telah menjadi sumber pangan dominan yang tercermin dari 50% total konsumsi nasional (Van der Eng 2001:190). Hari ini, 96% penduduk Indonesia makan beras ketimbang sumber pangan lainnya (Simatupang, 1999).

Lambang padi digunakan sebagai simbol kemakmuran negara. Di daerah-daerah produsen jangung dan umbi jalar seperti Timor dan Papua, padi tetap disimbolkan sebagai lambang pemerintahan daerah. Dari penelusuran di Internet terhadap lambang-

¹ FIVIMS: Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems. [Online] <http://www.fivims.net/static.jsp?lang=en&page=overview>

lambang pemerintah kabupaten, hampir tidak ada propinsi yang tidak memasukan padi sebagai lambang daerah.

Tingginya ketergantungan pada beras di daerah seperti Timor, Maluku, Papua, dan Kalimantan telah terjadi sejak jaman kolonial memberlakukan perdagangan antar pulau di Nusantara. Karenanya menuduh Soharito sebagai biang politisasi beras dan penyebab diskriminasi pangan lokal adalah tuduhan yang tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena politisasi beras masa Suharto dibangun pada pola yang sudah terbawa sejak masa kolonial (Reid 1984).

4. Kebijakan Pangan Indonesia: 1952-2005

Kebijakan harga beras telah menjadi basis kebijakan pangan dan beras lebih dari 300 tahun, sejak masa kolonial (Mears & Moeljono 1981). Sayangnya, *nature* dari kebijakan harga pangan hari ini sangat berbeda dengan asal-muasalnya. Pemerintah Kolonial Belanda selalu menginginkan harga buruh yang murah bagi investasi pertaniannya di Nusantara. Karena itu, harga dasar pangan dan beras selalu ditekan rendah, karena harga beras sangat penting bagi konsumsi keluarga, sehingga perlu membuat harga dasar pangan utama tersebut rendah sepanjang waktu. (Mears and Moeljono 1981:23-24).

President Sukarno menjiplak kebijakan yang sama dengan motivasi dukungan politik. Sukarno ingin memproteksikan kekuasaannya dengan cara mengambil hati pegawai negeri sipil dan militer dengan cara proteksi pendapatan melalui beras sebagai komponen gaji bulanan (Mears and Moeljono 1981). Tujuannya yakni rezim yang belia memerlukan kesetiaan dan dukungan politik.

Masa pemerintahan Suharto regime selama 32 tahun secara telak menjiplak hal yang sama. Bisa dibayangkan dukungan beras untuk memberi makan 4.6 juta PNS dan 0.5 juta militer² akan berdampak pada hasil voting dalam pemilu. Kondisi menjadi lebih buruk ketika beras dibaptis menjadi barometer ekonomi pembangunan tapi pada saat yang sama berfungsi sebagai alat politik.

² See: <http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/countries/indonesia/shapesize.htm> Akses 20 May 2005

Kelahiran Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun 1967 (Lihat tabel 1), sejak awal diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme: stabilisasi harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Bulog berfungsi sebagai pengontrol harga beras dengan cara mematok harga beras domestic secara signifikan lebih tinggi dari harga beras dunia (Alderman & Timmer 1980, Timmer Falcon and Pearson 1983, Timmer 2002). Hal ini masih menjadi kebijakan Megawati hingga tahun 2004 (Timmer 2004a).

Kondisi ini diperparah lagi dengan korupsi di tubuh BULOG (Timmer 2004a). Simatupang (1999:5) menuduh kebijakan pangan Indonesia sebagai praktek *kleptocracy*³, yang berarti bahwa rezim Suharto menggunakan Bulog sebagai mesin uang bagi kepentingan pribadi dan keuntungan politis. Akhir 1980, Bulog tetap ditugasi untuk memerankan kontrol pasar perberasan Indonesia tetapi sedikit diperluas untuk menangani komoditas pangan lain seperti gula pasir, gandum, jagung, kedelai dan sejumlah komoditas lainnya.

Table 1 menunjukkan bahwa Indonesia bergumul dengan upaya mencapai swasembada pangan sejak 1952 hingga hari ini. Pencapaian swasembada pangan 1984 tidak mampu dijaga secara berkelanjutan. Yang perlu dicatat adalah upaya mencapai swasembada pangan tidak disertai oleh upaya penguatan ketahanan pangan.

Susilo Bambang Yudoyono (SBY) gencar mempromosikan “revitalisasi pertanian”, dengan upaya mencapai swasembada beras maupun non-beras. Melalui pengarus-utamaan pangan alternatif seperti jagung, singkong, di samping beras. Karena itu, di atas kertas, ada peningkatan kualitas kebijakan dibandingkan rezim kepresidenan sebelumnya. Revitalisasi pertanian termasuk di dalamnya juga pembangunan sektor agribisnis demi terciptanya nilai tambah komoditas agribisnis demi pendapatan dan akses atas pangan yang lebih baik.

³ karakter aparat pemerintah yang kerap berfokus memperkaya diri sendiri Simatupang (1999:5)

Table 1. Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia Sejak 1952
(Dikelolah sendiri dari Mears 1984, Mears and Moeljono 1981 dan berbagai sumber).

Ordo	Rezim Pemerintahan	Kebijakan Pangan	Catatan
Orde Lama (Paska Kemerdekaan)	Soekarno 1952-1956	Swasembada Beras Melalui Program kesejahteraan Kasimo	1950-1952: BAMA (Yayasan Bahan Makanan) 1953-1956: YUBM (Yayasan Urusan Bahan Makanan.)
	Soekarno 1956-1964	Swasembada Beras Melalui Program Sentra Padi	1956: YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) 1963: Substitution Jagung 1964: PP No. 3 – Food Material Board* 1964: Bimas' dan "Panca Usaha" Tani
Pemerintahan Transisi 1965-1967			1996: Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) 1967: Dibubarkannya KOLOGNAS 1967: 14/05, Badan Urusan Logistik (BULOG) didirikan dan berfungsi sebagai pembeli beras tunggal
Orde Baru (Orde Pembangunan)	Soeharto' Repelita 1 & 2 1969-1979	Swasembada Beras	1969: Tambahan tugas Bulog: Manajemen Stok Penyangga Pangan Nasional – dan penggunaan neraca pangan nasional sebagai standar ketahanan pangan. 1971: Tambahan tugas Bulog sebagai pengimpor gula dan gandum 1973: Lahirnya Serikat Petani Indonesia 1974: Tambahan tugas Bulog: Pengadaan daging untuk DKI Jakarta 1974: Penggunaan Revolusi Hijau untuk mencapai swasembada beras 1977: Tambahan Tugas Bulog: Kontrol impor kacang kedelai. 1978: Penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau
	Soeharto Repelita 3 & 4 1979-1989	Swasembada Pangan	1978: Keppres39/1978, Pengembalian tugas Bulog sebagai kontrol harga untuk gabah, beras, tepung gandum, gula pasir dll. 1984: Medali dari FAO atas tercapainya Swasembada Pangan.
	Soeharto Repelita 5,6,7 1989-1998	Swasembada Beras	1995: Penganugerahan pegawai Bulog sebagai Pegawai Negeri Sipil 1997: Perubahan fungsi Bulog untuk mengontrol hanya untuk harga beras dan gula pasir. 1998: Penyempitan peran Bulog yang berfungsi sebagai pengontrol harga beras saja.
Reformasi: (Transisi)	Habibi 1998/1999	Swasembada Beras	1998/1999: Penjualan Pesawat IPTN yang ditukar dengan Beras Thailand.
	A. Wahid 1999/2000	Swasembada Beras	2000: Penganugerahan tugas Bulog untuk management logistic beras (penyediaan, distribus dan control harga)
Reformasi (Setelah 2000)	Megawati 2000/2004	Swasembada Beras	2003: Privatisasi Bulog 2004: No-Option Strategy Kecuali Swasembada Beras.
	S. Bambang Yudoyono (SBY) (2004-2009)	"Revitalisasi Pertanian"	2005: "revitalisasi pertanian" – komitmen (janji) untuk peningkatan pendapatan pertanian untuk GDP, pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan swasembada beras, jagung serta palawija.

5. Swasembada Pangan ≠ Ketahanan Pangan

Kesamaan antara Orde Lama dan Orde Baru, hingga Orde Reformasi, hingga pemerintahan SBY kini adalah komitmen untuk mencapai swasembada beras ditingkat nasional. Melalui program Kesejahteraan Kasimo (1952-1956), ataupun swasembada beras melalui Program Sentra Padi (1956-1965) hingga Repelita 1,2,5,6 dan 7 juga menitik beratkan pada swasembada. Orde Baru sempat mengganti orientasi kebijakan pangan dari swasembada beras ke swasembada pangan secara umum pada Repelita 3 dan 4. Hasilnya sempat dirasakan pada tahun 1984 di mana Indonesia mencapai level swasembada pangan.

Selama empat tahun kepemimpinan Megawati (2000-2004), penjiplakan kebijakan swasembada pangan terus dilakukan. Statement Megawati yang terkenal adalah “Tidak ada pilihan lain kecuali Swasembada”. Fakta menunjukkan bahwa produksi pangan Indonesia tahun 2004 mampu memberikan hasil yang menggembirakan (lihat Food Outlook FAO April 2004), tapi disayangkan bahwa Indonesia tidak mampu mencapai ketahanan pangan yang memadai. Peristiwa kelaparan dan malnutrisi di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan hal ini Atmarita (2005).

Stevens et. al. (2000) memberikan ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan (Lihat table 1). Botswana, sebagai misal, sebagai Negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi pada “self-reliance”, yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan import terhadap ketahanan pangan nasional. (Stevens et. al. 2003: 2).

Negara-negara kategori A (USA, Canada, Australia, Brunei) memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena memiliki kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berswasembada pangan tetapi sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara C seperti Singapura, Norwegia dan Jepang, mereka sama sekali tidak swasembada pangan tetapi memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari Negara-negara kategori B seperti Indonesia, Filipina dan Myanmar.

Table 2. Ketahanan Pangan versus Swasembada Pangan (dimodifikasi dari Stevens et. al. (2000: 3)⁴

	Ketahanan Pangan	Ketidaktahanan Pangan
Swasembada Pangan	A	B
	Contoh: USA, Kanada, Australia, Brunei, etc.	Contoh: Myanmar, Indonesia, Filipina
Tidak Swasembada Pangan	C	D
	Contoh: Norwegia, Jepang, Singapura, etc.	Contoh: Malawi, Eritrea, Kenya, Kongo, East Timor.

Terlihat bahwa ketahanan pangan bukan persoalan produksi semata tetapi lebih soal management investasi pada sektor-sektor non pangan dan non-pertanian dilihat sebagai bagian integral dari pencapaian ketahanan pangan. Setidaknya, ini konsisten dengan argument Amarya Sen (1981) bahwa produksi pangan bukan determinan tunggal ketahanan pangan, melainkan hanyalah salah satu faktor penentu.

Terlihat secara jelas bahwa Negara-negara kategori B mampu mencapai swasembada pangan tetapi mengalami ketidak-tahanan pangan. Indonesia mampu berswasembada pangan. Ini jelas terlihat ketika Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, justru jumlah bantuan pangan USA pada waktu yang sama adalah rata-rata tigapuluh kali lebih besar ketimbang decade 90an, ketika Indonesia tidak lagi memegang predikat swasembada pangan nasional. Jelaslah bahwa swasembada tingkat nasional tidak serta merta menjawab persoalan distribusi pangan dan akses atas pangan secara adil dan merata (Stevens et. al. 2000: 3).

Negara-negara kategori D adalah yang paling rentan karena disamping tidak memiliki kapasitas produksi untuk berswasembada, juga tidak mapu menciptakan ketahanan pangan. Solusi buat negara-negara seperti ini adalah intervensi bantuan pangan internasional.

6. Catatan Penutup: Ketahanan Pangan dan Tantangan Globalisasi

Thompson & Cowan (2000: 402) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60% pangan nasional. Sisanya, 40% didapatkan dari import pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang berbeda.

Tantangan terbesar Indonesia adalah bahwa tidak dengan mudah kita mengabaikan perdagangan pangan global karena tingkat urbanisasi yang tinggi yang berbarengan dengan tingkat kemiskinan perkotaan, yang mana sangat membutuhkan pangan yang murah, kecuali ketergantungan pada produksi pangan domestik bisa menjamin harga pangan yang murah bagi kaum miskin kota. Tapi pada saat yang sama harus menghadapi cara bagaimana memproteksi petani kecil dan miskin dari dampak perdagangan pangan global. Meningkatnya populasi penduduk perkotaan dari 15% di tahun 1950 menjadi 46% di tahun 2003, menjadi tantangan pemenuhan ketahanan pangan kota.

⁴ Dikembangkan dari Stevens et. al. 2000

Dilema bagi Indonesia adalah bahwa Petani tidak banyak menikmati harga dasar pangan yang adil. Sayangnya harga yang adil bagi petani identik dengan naiknya harga pangan. Sedangkan kaum miskin kota, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun justru membutuhkan pangan yang murah, demi akses yang lebih baik bagi kaum miskin.

Revitalisasi pertanian SBY hanya menyentuh aspek produksi dan tidak banyak menjawab persoalan yang lebih hakiki yakni soal akses atas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Aspek akses mendapat ancaman serius dengan naiknya BBM dan tidak serta merta selesai dengan kompensasi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai.

BIBLIOGRAPHY

Hoddinott, J. (1999) *Operationalizing Household Food Security in Development Projects: An introduction*, International Food Policy Research Institute Technical Guide No.1, Washington, D.C.

Sen, A. (1981) *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford, Clarendon Press).

Stevens, C., Greenhill, R., Kennan, J., & Devereux S. (2000) *The WTO Agreement on Agriculture and Food Security*, (Commonwealth Secretariat).

Thompson J. S. and Cowan J. T. (2000) *Globalizing Agro-Food Systems in Asia: Introduction World Development*, Vol. 28, No. 3, pp. 401±407, 2000,

Alderman C.H. and Timmer, C. P. (1980) Food Policy and Food Demand in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES)*, Vol. 16, No. 3, pp 83-93.

Atmarita (2005) Nutrition Problems in Indonesia. Seminar Paper on Lifestyle – Related Diseases Gajah Mada University, Indonesia.

Boudreau E.T. and Dilley M. (2001) Coming to terms with vulnerability: a critique of the food security definition. *Food Policy* 26 pp 229–247.

Dreze, J. and Sen, A. (1989), *Hunger and Public Action*. Oxford University Press.

FAO 2003, Trade Reform and Food Security – Conceptualizing the linkages.

FAO 2005, FAOSTAT data. [online] <http://faostat.fao.org/faostat/collections?version=ext&hasbulk=0>. last accessed 1st August 2005

Hoddinott, J. (1999) Operationalizing Household Food Security in Development Projects: An introduction. International Food Policy Research Institute Technical Guide No.1, Washington, D.C.

Maxwell, S. (1996) Food security: a post-modern perspective. *Food Policy*, Vol. 21. No. 2, pp 155-170.

Maxwell, S., and Frankenberger, T. (1992) Household food security concepts, indicators, and measurements. New York, NY, USA: UNICEF and IFAD.

Maxwell S. & Slater, R. (2003) Food Policy Old and New. *Development Policy Review*, Vol. 21(5-6), pp 531-553.

Mears, L. (1978) Problems of Supply and Marketing of Food in Indonesia in Repelita III, BIES Vol. XIV No. 3 pp 52-62.

Mears, L. (1984) Rice and Food Self-Sufficiency in Indonesia. BIES Vol. XX No. 2 pp 122-138.

Reid, A. (1984) The Pre-Colonial Economy of Indonesia. BIES, Vol. XX No. 2. pp. 151-167.

Sage, C. (2002) Food security and Environment. In Page & Redclift, ed. (2002) *Human Security and the Environment: International Comparisons*. Cheltenham: Edward Elgar, pp 128-153.

Sen, A. (1981) *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford, Clarendon Press.

Simatupang, P. (1999) Toward Sustainable Food Security: The Need for A New Paradigm. ACIAR Indonesia Research Project, Working Paper 99.15. 33 pp.

Timmer (2002) Food Security and Rice Price Policy in Indonesia: The Economics and Politics of the Food Price Dilemma. IFPP-Bappenas/Departmen Pertanian/ USAID/DAI. Working Paper 14.

Timmer C. P (2004a) Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook. Centre for Global Development, Working Paper Number 48.

Timmer C. P. (2004b) Food Security and Economic Growth: An Asian perspective. *Asian-Pacific Economic Literature*, Heinz W. Arndt Memorial Lecture, Canberra.

Timmer C. P., Falcon, W. P., and Pearson, S. R. (1983) *Food Policy Analysis*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

van der Eng, P. (1996) *Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880*. Macmillan Press Ltd.

van der Eng, P. (1998) Cassava in Indonesia: A Historical Re-Appraisal of an Enigmatic Food Crop. *Southeast Asian Studies*, Vol. 36. pp. 3-33.

van der Eng, P. (2000) Food for Growth: Trends in Indonesia's Food Supply, 1880-1995. *Journal of Interdisciplinary History*, XXX: 4. pp. 591-616.